



URUSAN PEMERINTAHAN	:	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas / Balai / Cabang Dinas	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Program	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
A. Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Indikator Sub keg	:	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan
Dukungan terhadap Indikator Program (Nilai survey kepuasan komunikasi publik)	:	- Penyelenggaraan pertemuan pelaku kehumasan pemerintah sebanyak 2 kali setahun; - Penyelenggaraan fasilitasi uji kompetensi wartawan dan jurnalis sebanyak 1 kali dalam setahun.
B. Sasaran	:	1. Pelaku kehumasan pemerintah di Jawa Tengah; 2. Komunitas wartawan/jurnalis di Jawa Tengah;
C. Output Kegiatan		
1. Satuan	:	Orang
2. Lokasi	:	1. Provinsi Jawa Tengah 2. Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah
D. Latar Belakang kondisi existing	:	a. Partisipasi kegiatan pertemuan kehumasan masih belum optimal, karena ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang tidak hadir, dan belum melibatkan instansi pemerintah pusat dan instansi vertikal lainnya; b. Perlu dilakukan sinkronisasi berkala terhadap pelaku kehumasan pemerintah di seluruh instansi Provinsi Jawa Tengah; c. Sinergi dan koordinasi antar lembaga pengelolaan kehumasan di lingkup Pemerintah Prov. Jawa Tengah dengan kabupaten dan kota se-Jawa Tengah dan instansi terkait perlu ditingkatkan;
Gambaran Kesenjangan (permasalahan)	:	a. Belum semua SKPD Pemprov Jateng terdapat lini kerja di bidang kehumasan atau pranata humas yang bertugas untuk mengampu layanan informasi SKPD; b. Masih ada perbedaan lini organisasi pengelola kehumasan antar pemerintah daerah, seperti adanya bagian/biro humas dan dinas komunikasi informatika;

- c. Integrasi tujuan dan bauran diseminasi informasi belum optimal dan masih parsial;

- E. Lingkup Kegiatan :**
- a. Maksud dan Tujuan Kegiatan :
 - meningkatkan kapasitas dan pemahaman pelaku kehumasan di Provinsi, Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
 - Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
 - Menjalin komunikasi antara petugas kehumasan dan jurnalis
 - b. Mekanisme / metode pelaksanaan kegiatan :
 - Swakelola dan kontraktual (pengadaan langsung/e-purchasing)
 - c. Kebutuhan Waktu : 12 bulan
 - d. Siapa yang terlibat :
 - SKPD Pemprov Jateng,
 - Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah,
 - komunitas kehumasan
 - komunitas wartawan/jurnalis

F. Komponen Kegiatan

Kebutuhan operasional kegiatan :

- 1. Kebutuhan Belanja Pegawai : - PNS dan Non PNS Bidang Informasi & Komunikasi Publik
 - 2. Dukungan Tenaga Ahli / Pakar : - Pranata Humas
- Administrasi
- Pakar/Ahli Komunikasi Publik
- Analis Kebijakan/Analis Publikasi
 - 3. Koordinasi : **Rencana Koordinasi :**
 - Melakukan pemetaan terhadap jumlah pranata humas di Jawa Tengah.
 - Melaksanakan rapat koordinasi antar SKPD Pemprov. Jateng, terhadap potret pemberdayaan pranata humas;
 - Melaksanakan koordinasi sebagai tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - Melakukan kerjasama kehumasan dengan seluruh pelaku humas di Jateng;
 - 4. Tinjauan Lapangan : Rencana dan Tujuan Tinjauan Lapangan :
 - 1. Untuk menjalin koordinasi dan kerjasama kehumasan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
 - 2. Menjalin koordinasi dengan pelaku jurnalistik;
- Pihak yang terlibat :
- 1. PNS dan Non PNS Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ;
 - 2. SKPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah;
 - 3. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
 - 4. Komunitas Kehumasan

5. Komunitas Wartawan/Jurnalis

Keluaran/ Output :
- Terselenggaranya pertemuan komunitas kehumasan sebanyak 2 kali setahun;
- Penyelenggaraan fasilitasi uji kompetensi wartawan sebanyak 1 kali dalam setahun

Hasil/ Outcome :
- Meningkatnya kemampuan wartawan dan sumberdaya kehumasan lainnya di Jawa Tengah;
- Terbangunnya citra positif instansi pemerintah;
- Dukungan terhadap capaian indeks kemerdekaan pers;
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap informasi yang disediakan pemerintah;

Kebutuhan Belanja Modal :

1. Kebutuhan / dukungan alat / barang
 - Belanja pegawai (honor pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan)
 - Belanja Barang/Jasa

G. Anggaran dan Target : Tahun 2025 : Rp. 400.000.000 ,-
Tahun 2026 : Rp. 500.000.000,-

Semarang, Desember 2024

Disusun dan diketahui oleh :
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi



Moch Faizin, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19731119 199403 1 005